

BAB

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional. Salah satu tujuan nasional sesuai dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea IV yaitu meningkatkan kesejahteraan secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sasaran dalam pembangunan nasional yaitu menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu penyakit yang selalu dirasakan masyarakat dan dapat dilihat bahwa banyaknya masyarakat kekurangan makanan ataupun minuman, tidak memiliki tempat tinggal dan tidak layak, kebanyakan penduduk miskin bertempat tinggal di kolong jembatan, di pinggir rel kereta api, di pinggir sungai, tidak memiliki pakaian yang layak pakai, kurangnya pendidikan, kurangnya fasilitas kesehatan, diperlakukan secara tidak adil dalam aspek politik, hukum, sosial ekonomi, sosial budaya dan rentan melakukan kriminal. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang tidak dapat terselesaikan hingga saat ini, tetapi pemerintah hanya dapat berupaya membuat berbagai kebijakan dan berbagai program dalam menanggulangi masalah kemiskinan sehingga dapat menurunkan dan menekan jumlah penduduk miskin secara bertahap dari tahun ke tahun.

Kemiskinan merupakan suatu fenomena multidimensional atau suatu konsep yang terintegrasi (*integrated concept*) dengan sejumlah dimensi yaitu: 1) miskin (*poor*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hidup

dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. (Purba, Tobing, dan Hutabarat, 2014:76-77)

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara berkembang terutama Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki 34 provinsi. Setiap provinsi Indonesia memiliki masalah kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dalam mengatasi masalah kemiskinan ini, pemerintah harus mengetahui penyebab dan faktor yang mempengaruhi masalah kemiskinan yang terus-menerus meningkat. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kemiskinan di Indonesia yaitu upah minimum yang masih rendah, melambatnya pertumbuhan ekonomi, terjadinya inflasi secara terus menerus, semakin bertambahnya jumlah orang yang menganggur, memiliki pendidikan yang rendah, bertambahnya jumlah penduduk dan rendahnya tingkat kesehatan pada masyarakat.

Provinsi Sumatera Utara adalah wilayah Indonesia yang memiliki urutan ke empat terbesar jumlah penduduk setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang terbesar bagi pemerintah dikarenakan tidak hanya dampak positif yang ditimbulkan tetapi juga dampak negatif atau masalah yang besar yang akan terjadi jika pemerintah tidak dapat mengendalikannya. Salah satu masalah yang akan timbulkan akibat besarnya jumlah penduduk Sumatera Utara yaitu meningkatkan tingkat kemiskinan. Permasalahan kemiskinan di Provinsi

Sumatera Utara dipengaruhi oleh faktor-faktor adalah inflasi yang tinggi, meningkatnya jumlah pengangguran, dan rendahnya upah minimum provinsi.

Inflasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Menurut Suparmoko dan Sofilda (2016:185) bahwa "Inflasi adalah suatu keadaan yang terdapat kenaikan harga umum secara terus-menerus. Jadi bukan kenaikan harga satu atau dua macam barang saja, melainkan kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa, dan pula bukan hanya satu atau dua kali kenaikan harga, melainkan harga secara terus-menerus". Inflasi terjadi disebabkan jumlah uang beredar di tangan masyarakat sangat banyak sehingga menimbulkan permintaan terhadap suatu barang atau jasa akan semakin bertambah (*demand pull inflation*) sedangkan penawaran masih tetap. Bila terjadi inflasi yang sangat tinggi secara terus-menerus akan mengganggu kestabilan perekonomian dan menurunkan nilai mata uang rupiah sehingga dapat menekan daya beli masyarakat dan akan mendorong meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Pengangguran terbuka juga dapat menjadi faktor penyebab terjadi penduduk miskin. "Pengangguran (*unemployment*) merupakan keadaan di mana seseorang digolongkan dalam kategori angkatan kerja (*labour force*) yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan" (Nanga, 2001:253). "Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang digolongkan dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya" (Sukirno, 2016:13). Pengangguran terbuka disebabkan karena sedikitnya tersedia lapangan pekerjaan dan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah angkatan kerja. Masalah pengangguran terbuka ini membuat produktivitas

masyarakat berkurang dan pendapatan masyarakat juga ikut berkurang. Menentukan suatu kemakmuran masyarakat yaitu pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Tingkat kemakmuran yang tinggi akan mengurangi jumlah pengangguran, sedangkan semakin rendahnya tingkat kemakmuran akan menambah jumlah pengangguran dan menimbulkan masalah kemiskinan.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin adalah upah minimum. Masalah upah yang terlalu rendah mengakibatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin. Masalah ketenagakerjaan ini dapat diatasi oleh pemerintah dengan memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Penetapan kebijakan upah minimum merupakan usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan upah per kapita pekerja sehingga tingkat upah rata-rata tenaga kerja dapat meningkat dan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam bab 1, pasal 1 ayat 30 menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera yaitu inflasi, tingkat pengangguran terbuka (TPK), dan upah minimum provinsi (UMP). Hal ini dapat dilihat berdasarkan Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin, Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Inflasi (%)	TPT (%)	UMP (Rupiah)
2015	1.463.660	3,24	6,71	1.625.000
2016	1.455.950	6,34	5,84	1.811.875
2017	1.453.870	3,20	5,60	1.961.355
2018	1.324.980	1,33	5,56	2.132.189
2019	1.282.040	2,23	5,41	2.303.403

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara

Data Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebesar 1.463 juta jiwa sedangkan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan menjadi sebesar 1.282 juta jiwa. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2019:7-8) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada periode September 2018-Maret 2019 antara lain adalah:

- a. Pada Selama periode September 2018 – Maret 2019, inflasi Sumatera Utara cukup terkendali yaitu sebesar 1,14 persen dan harga eceran komoditas penting relatif stabil. Dalam angka inflasi yang rendah atau stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,56 persen pada 2018 turun menjadi 5,41 persen pada tahun 2019. Dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka ini memberikan dampak positif yaitu masyarakat yang menganggur telah mendapatkan pekerjaan, akan mendapatkan pendapatan dan menciptakan kesejahteraan.
- c. Pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil meskipun mengalami sedikit penurunan dari 5,43 persen pada tahun 2018 dan turun menjadi 5,30 persen pada tahun 2019.
- d. Nilai tukar petani di Sumatera Utara selama periode terakhir belum menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, sehingga diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di pedesaan.
- e. Rata-rata pengeluaran perkapita per bulan untuk penduduk yang berada pada Desil 1 selama periode September 2018-Maret 2019 secara total tumbuh 4,26 persen, dan di perkotaan tumbuh 5,69 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan Garis Kemiskinan secara total pada periode yang sama yaitu sebesar 3,20 persen dan di perkotaan 3,84 persen. Sebaliknya, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk penduduk yang berada pada Desil 1 di pedesaan hanya tumbuh 2,31 persen lebih rendah dibandingkan kenaikan Garis Kemiskinan pada periode yang sama sebesar 2,37 persen.

Kondisi inflasi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 6,34% dibandingkan pada tahun 2015 inflasi sebesar 3,24%. BPPRD Provinsi Sumatera Utara (2020:26) menyatakan bahwa faktor utama penyebab tingginya laju inflasi tahun 2016 adalah terjadinya kenaikan harga komoditas bumbu-bumbuan terutama cabai merah yang melonjak cukup tajam yang dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan pasca erupsi gunung sinabung, adanya kebijakan kenaikan tarif beberapa komoditas seperti cukai, rokok, kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan. Penurunan TPT pada tahun 2015-2019 ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemauan masyarakat dalam mendapat pekerjaan dan semakin banyaknya lapangan pekerjaan tersedia sehingga angkatan kerja yang ada mampu diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia di Sumatera Utara.

Upah Minimum Provinsi di Sumatera Utara pada tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan UMP pada tahun 2015-2019 ini mengindikasikan agar kesejahteraan para pekerja tetap terjaga sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan mampu mempertahankan atau meningkatkan produktivitas kerjanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019 ?

2. Bagaimanakah pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019 ?
3. Bagaimanakah pengaruh upah minimum provinsi (UMP) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi (UMP) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan teori, dengan menguji teori-teori ekonomi yang berkaitan dengan pengaruh inflasi, tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum provinsi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara
- b. Kegunaan praktis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian adalah sebagai berikut :
 - 1) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah sebagai pembuat

kebijakan ekonomi dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

- 2) Bagi penduduk miskin, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan penulis dan dapat menerapkan ilmu-ilmu ekonomi.
- 4) Bagi fakultas, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan perbandingan kepada pembaca.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 kemiskinan

2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu penyakit dalam ekonomi yang sangat kompleks dan bersifat multidimensional yang keadaan di mana seseorang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, kesehatan atau ketika seseorang yang tidak mampu mencukupi kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2008:1) bahwa :

Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Menekan angka kemiskinan bukan pekerjaan yang mudah, diperlukan upaya dan kerja keras pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan upah pekerja. Jika lapangan kerja dibuka maka akan semakin banyak kesempatan masyarakat dapat bekerja dan memperoleh penghasilan. Hal tersebut akan mengurangi jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Badan Pusat Statistik sebagaimana dikutip Machmud (2016:281-282) menyatakan bahwa menetapkan beberapa kriteria kemiskinan yang mengacu pada besarnya pengeluaran tiap orang per harinya yaitu :

- a. Tidak miskin, yaitu seseorang dengan pengeluaran per bulan lebih dari Rp 350.610.
- b. Hampir tidak miskin, yaitu seseorang dengan pengeluaran per bulan antara Rp 280.488 s/d Rp 350.610, atau sekitar antara Rp 9.350 s/d Rp 11.687 dalam satu hari.
- c. Hampir miskin, yaitu seseorang dengan pengeluaran per bulan antara Rp 233.740 s/d Rp 280.488 atau sekitar antara Rp 7.780 s/d Rp 9.350 dalam satu hari.
- d. Miskin, yaitu seseorang dengan pengeluaran per bulan di bawah Rp 233.740 atau sekitar di bawah Rp 7.780 dalam satu hari.
- e. Sangat miskin (kronis), tidak ada kriteria beberapa pengeluaran per orang dalam satu hari. Tidak diketahui kepastian jumlahnya.

2.1.2 Penyebab Kemiskinan

Menurut Purba, Tobing, dan Hutabarat (2014:80-81) bahwa terdapat beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan adalah sebagai berikut :

- a. *Policy induces processes* yaitu proses kemiskinan yang dilestarikan, reproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan yang katanya "antikemiskinan", tetapi kenyataannya justru melestarikan.
- b. *Socio-economic dualism* yaitu gambaran kemiskinan yang diwariskan penjajah.
- c. *Population growth* yang menganggap bahwa kemiskinan disebabkan oleh penambahan penduduk yang pesat.
- d. *Recources management and the environment* di mana kemiskinan terjadi karena adanya unsur *mismanagement* sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang sembarangan tebang akan menurunkan produktivitas. Akibatnya petani bisa menjadi miskin.
- e. *Natural cycle and processes* di mana kemiskinan terjadi karena siklus alam, contohnya tinggal di lahan kritis adalah berbahaya dan kurang beruntung karena ketika musim hujan akan terjadi banjir dan pada musim kemarau akan kekurangan air sehingga mengakibatkan tidak maksimal produktivitasnya dan dapat didayagunakan terus-menerus.

- f. *The marginalization of woman* yaitu diskriminasi kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas dua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari kaum laki-laki.
- g. *Cultural and ethnic factors* yaitu faktor budaya dan etnik turut bekerja memelihara kemiskinan.
- h. *Exploitative intermediation* yaitu keberadaan penolong yang menjadi penolong, seperti rentenir (lintah darat) sehingga yang ditolong tetap terjerat dalam kemiskinan.
- i. *Internal political fragmentation and civil strife* yaitu suatu kemiskinan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politik yang kuat maka pada gilirannya dapat menjadi penyebab dari kemiskinan.
- j. *International processes* yaitu bekerja dengan sistem-sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

2.1.3 Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Purba, Tobing, dan Hutabarat (2014:77) bahwa kemiskinan dapat dibagi menjadi empat bentuk yaitu :

- a. Kemiskinan absolut adalah suatu konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan tetapi pada ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimum seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan agar bisa bertahan hidup.
- b. Kemiskinan relatif adalah konsep garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan suatu ukuran mengenai ketimpangan dalam distribusi pendapatan disebabkan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat.
- c. Kemiskinan kultural adalah konsep mempersoalkan sikap seseorang yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, dan tidak kreatif.
- d. Kemiskinan struktural adalah konsep kemiskinan yang disebabkan karena kurangnya akses terhadap sumber daya. Kemiskinan ini terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan tingginya kemiskinan.

2.1.4 Ukuran Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2020:1) bahwa :

Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang

diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak,dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Rumus perhitungan garis kemiskinan adalah :

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan :

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

2.2 Inflasi

2.2.1 Pengertian Inflasi

Masalah lainnya yang terus menerus menjadi pusat perhatian pemerintah adalah masalah inflasi. Menurut Venieris dan Sebold sebagaimana dikutip Nanga (2001:241) bahwa "inflasi sebagai suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus menerus sepanjang waktu (*a sustained tendency for the general level of prices to rise over time*)". Pemerintah berusaha untuk menjaga kestabilan harga - harga dengan mengurangi penawaran uang menaikkan atau menurunkan suku bunga, mengurangi pengeluaran pemerintah dan menambah pajak.

Inflasi merupakan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian. Tingkat inflasi (persentase pertambahan kenaikan harga) berbeda dari satu periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Tingkat inflasi yang rendah yaitu mencapai di bawah 2 atau 3 persen. Tingkat inflasi yang moderat mencapai di antara 4-10 persen. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus persen dalam setahun. (Sukirno, 2016:14)

Tujuan jangka panjang dalam kebijakan pemerintah yaitu menjaga tingkat inflasi yang berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi dalam nol persen bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena hal itu sangat sulit untuk dicapai. Yang paling penting yaitu pemerintah mengusahakan agar menjaga tingkat inflasi tetap rendah. (Sukirno, 2016:333)

Menurut Badan Pusat Statistik (2020:1) bahwa :

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

2.2.2 Ukuran Inflasi

Menurut Nanga (2001:242) bahwa ada tiga indeks yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat inflasi yaitu:

- a. Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index*) adalah suatu indeks harga yang mengukur biaya sekelompok (*basket*) barang dan jasa di pasar, termasuk harga makanan, pakaian, perumahan, transportasi, perawatan kesehatan, pendidikan, dan komoditi lainnya yang dibeli untuk menunjang kehidupan sehari-hari.
- b. Indeks Harga Produsen (*Producer Price Index*) adalah suatu indeks dari harga bahan-bahan baku (*raw materials*), produk antara (*intermediate products*), dan peralatan modal dan mesin yang dibeli oleh sektor bisnis atau perusahaan hanya bahan baku atau setengah jadi saja, sementara barang-barang jadi tidak dimasukkan di dalam perhitungan.
- c. GNP Deflator adalah suatu indeks yang merupakan perbandingan atau rasio antara GNP nominal dan GNP riil dikalikan dengan 100. GNP riil adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam perekonomian, yang diperoleh ketika output dinilai dengan menggunakan harga tahun dasar (*base year*). Oleh karena itu, GNP riil juga sering disebut GNP berdasarkan harga tahun dasar (*GNP at base year price*). Sedangkan GNP nominal adalah GNP yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku (*GNP at current market prices*). GNP deflator adalah suatu ukuran tentang tingkat harga maka indeks ini merupakan indeks harga yang secara luas digunakan sebagai basis untuk mengukur inflasi.

Ansori (2010:40-42) menyatakan bahwa :

Angka inflasi dapat dihitung berdasarkan angka indeks yang dikumpulkan dari beberapa macam barang yang diperjualbelikan di pasar dengan masing-masing tingkat harga. Barang-barang tersebut adalah barang yang paling banyak dan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Berdasarkan harga barang tersebut maka disusun suatu angka indeks. Angka indeks yang memperhitungkan semua barang yang dibeli oleh konsumen sesuai dengan harganya masing-masing disebut indeks harga konsumen (IHK atau *consumer price index* = PCI). Berdasarkan indeks harga konsumen dapat dihitung besarnya laju kenaikan harga-harga secara umum dalam periode tertentu seperti setiap 3 bulan dan 1 bulan. Selain menggunakan IHK, tingkat inflasi juga dapat dihitung dengan menggunakan GNP atau PDB deflator, yaitu membandingkan GNP dan PDB yang diukur berdasarkan harga berlaku (GNP atau PDB harga konstan/GNP atau PDB riil). Terdapat rumus untuk menghitung tingkat inflasi adalah :

$$I_n = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\%$$

$$Df_n = \frac{Df_n - Df_{n-1}}{Df_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

I_n = Inflasi

IHK_n = Indeks harga konsumen tahun dasar

IHK_{n-1} = Indeks harga konsumen tahun sebelumnya

Df_n = GNP dan PDB deflator tahun awal

2.2.3 Jenis-Jenis Inflasi

Menurut Ansori (2010:42-44) bahwa beberapa faktor penyebab timbulnya inflasi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan sebabnya yaitu :

- a. Jenis inflasi berdasarkan sifatnya
Berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi 4 kategori utama yaitu sebagai berikut :
 - 1) Inflasi merayap (*creeping inflation*), yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun.
 - 2) Inflasi menengah (*galloping inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 10%-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relative besar. Angka inflasi dalam kondisi ini biasanya disebut inflasi dua digit, misalnya 15%, 20%, 30%.
 - 3) Inflasi tinggi (*high inflation*), yaitu inflasi yang besarnya 30-100% per tahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum akan naik.
 - 4) Inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*), yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (diatas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin menyimpan uang karena nilai mata uang tersebut akan merosot tajam sehingga lebih baik ditukar dengan barang.
- b. Jenis inflasi berdasarkan sebabnya, yaitu :
 - 1) *Demand pull inflation* yaitu inflasi yang timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi disatu pihak dan kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh (*full employment*) di pihak lain untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru.
 - 2) *Cost push inflation* yaitu inflasi yang disebabkan oleh turunnya produksi karena naiknya biaya produksi (naiknya biaya produksi

dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh atau menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat, dan sebagainya). Ada dua hal yang dapat dilakukan oleh produsen sehubungan dengan naiknya biaya produksi yaitu langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama atau harga produknya naik (karena tarik menarik permintaan dan penawaran) karena penurunan jumlah produksi.

2.2.4 Teori Inflasi

Menurut Atmadja sebagaimana dikutip Febrian (2015:51-54) bahwa teori inflasi yaitu :

a. Teori kuantitas

Teori kuantitas adalah teori yang menekankan pada peranan jumlah uang beredar dan harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi. Inti dari teori ini adalah sebagai berikut :

- 1) Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun giral.
- 2) Laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan oleh harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang.

b. Keynesian model

Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat), akibatnya akan terjadi *inflationary gap*. Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan (permintaan agregat). Oleh karena sama seperti pandangan kaum monetarist, Keynesian model ini lebih banyak dipakai untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek.

c. Teori Struktural : Model Inflasi di Negara Berkembang

Banyak studi mengenai inflasi di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa inflasi bukan semata-mata merupakan fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural atau *cost push inflation*. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi negara-negara berkembang pada umumnya yang masih bercorak agraris sehingga goncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri, seperti gagal panen (akibat faktor eksternal pergantian musim yang terlalu cepat berencana alam dan sebagainya) atau hal-hal yang memiliki hubungan luar

negeri, misalnya memburuknya *term of trade*, utang luar negeri dan kurs valuta asing, dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik. Fenomena struktural yang disebabkan oleh kesenjangan atau kendala struktural dalam perekonomian di negara berkembang sering disebut dengan *structural bottlenecks*.

2.2.5 Dampak Inflasi

Menurut Ningsih (2012:27-28) bahwa inflasi yang terjadi di dalam suatu perekonomian memiliki beberapa dampak atau akibat yaitu sebagai berikut :

- a. Inflasi dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akan menyebabkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil orang lainnya jatuh.
- b. Inflasi dapat menyebabkan penurunan di dalam efisiensi ekonomi (*economic efficiency*).
- c. Inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan di dalam output dan kesempatan kerja (*employment*).
- d. Inflasi dapat menciptakan suatu lingkungan yang tidak stabil (*unsable environment*) bagi keputusan ekonomi.

Adapun dampak inflasi terdapat individu dan masyarakat yaitu :

- a. Memperburuk Distribusi Pendapatan
Nilai harta tetap seperti tanah atau bangunan mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada pendapatan, sedangkan masyarakat berpendapatan rendah biasanya tidak memiliki harta tetap tersebut akan mengalami kemerosotan nilai pendapatan riilnya.
- b. Pendapatan Riil Merosot
Sebagian besar tenaga kerja memiliki pendapatan nominal yang nilainya tetap. Pada masa inflasi kenaikan harga barang-barang akan membuat pendapatan riil masyarakat menjadi turun.

2.2.6 Mengatasi Inflasi

Menurut Sukirno (2016:354) bahwa ketiga kebijakan pemerintah tersebut perlu dilakukan secara serentak untuk meningkatkan keefektifannya. Bentuk masing-masing kebijakan pemerintah tersebut untuk mengatasi masalah inflasi sebagai berikut:

- a. Kebijakan fiskal yaitu dengan menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah.
- b. Kebijakan moneter yaitu dengan mengurangi, menaikkan suku bunga dan membatasi kredit.
- c. Kebijakan segi penawaran yaitu dengan melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi.

2.3 Pengangguran Terbuka

2.3.1 Pengertian Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang sudah tergolong dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan dan tidak sesuai dengan tingkat upah yang diharapkan. Menurut Sukirno (2008:355) bahwa "pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak memperolehnya". Pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada sehingga produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang dan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial ekonomi yaitu kemiskinan.

2.3.2 Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Sukirno (2016:330), berdasarkan ciri-ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat pula digolongkan sebagai berikut :

- a. Pengangguran Terbuka adalah pengangguran yang akibat dari pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Akibat dalam perekonomian yaitu semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan.
- b. Pengangguran Tersembunyi adalah pengangguran yang disebabkan kelebihan tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan ekonomi.

- c. Pengangguran Bermusim yaitu terjadi karena adanya pergantian musim biasanya terjadi pada sektor perikanan dan pertanian.
- d. Setengah Menganggur yaitu terjadi akibat migrasi dari desa ke kota sangat pesat sehingga tidak semua orang memperoleh pekerjaan dengan mudah, sebagian menjadi penganggur sepenuh waktu, ada pula yang tidak menganggur tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka adalah jauh lebih sedikit dari jam kerja normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu.

2.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Menurut Sukirno (2008:330) bahwa "pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja atau terjadi akibat dari kemunduran perkembangan sesuai industri".

Menurut Badan Pusat Statistik (2020:1) bahwa "Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja". Dalam menghitung tingkat pengangguran terbuka dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TPT = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

2.3.4 Mengatasi Pengangguran

Menurut Sukirno (2016:354) bahwa ketiga kebijakan pemerintah tersebut perlu dilakukan secara serentak untuk meningkatkan keefektifannya. Bentuk masing-masing kebijakan pemerintah tersebut untuk mengatasi masalah pengangguran sebagai berikut:

- a. Kebijakan fiskal yaitu dengan mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah.

- b. Kebijakan moneter yaitu dengan menambah penawaran uang, mengurangi/menurunkan suku bunga dan menyediakan kredit khusus untuk sektor atau kegiatan tertentu.
- c. Kebijakan segi penawaran yaitu dengan mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, memberi subsidi dan mengurangi pajak perusahaan dan individu.

2.4 Upah Minimum Provinsi

2.4.1 Pengertian Upah

Upah merupakan salah satu masalah yang menyebabkan tinggi atau rendahnya tingkat kemiskinan karena tingkat upah yang rendah maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin bahkan jauh dari kata kesejahteraan masyarakat, begitu sebaliknya. Penetapan upah di setiap wilayah Indonesia masih belum merata dan terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Namun, pemerintah berupaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat setiap wilayah di Indonesia dengan menciptakan Undang-undang tentang ketenagakerjaan.

Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 30, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2020:1) bahwa :

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.

2.4.2 Teori Upah

Menurut Simanjuntak (1985:106-109) bahwa secara teoritis dapat dibedakan dua sistem pengupahan yaitu yang didasarkan pada teori Karl Marx dan yang didasarkan pada teori Neoklasik.

a. Upah Menurut Kebutuhan

Ajaran Karl Marx pada dasarnya berpusat pada tiga hal. Ajaran pertama adalah teori nilai. Marx berpendapat bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai ekonomi. Jadi nilai sesuatu barang adalah nilai dari jasa buruh atau dari jumlah waktu yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Pandangan ini tidak cocok dengan kenyataan dikarenakan, walaupun manusia merupakan faktor yang paling utama dalam proses produksi namun peranan faktor modal seperti mesin-mesin ternyata besar. Peranan faktor modal ini tidak dipertimbangkan dan peranan selera pola konsumsi masyarakat ternyata sangat berpengaruh dalam penentuan harga. Ajaran kedua adalah menyangkut pertentangan kelas. Marx berpendapat bahwa kapitalis selalu berusaha menciptakan barang-barang modal untuk mengurangi penggunaan buruh. Dengan demikian akan timbul pengangguran besar-besaran dan pengangguran yang sangat besar ini maka pengusaha dapat menekan upah. Pandangan yang salah ini dibantah dengan berbagai kenyataan yang dapat disaksikan misalnya; sejak awal abad 20, telah berkembang aliran pendekatan manusiawi (*human approach*) dalam manajemen perusahaan, adanya campur tangan pemerintah dalam penentuan sistem upah dan secara langsung mengatasi pengangguran melalui proyek-proyek pemerintah dan hadirnya serikat pekerja dan ikut berperan mendampingi pengusaha dalam menentukan sistem upah. Ajaran ketiga adalah terbentuknya masyarakat komunis. Dalam masyarakat ini seseorang tidak menjualkan tenaganya kepada yang lain, akan tetapi masyarakat itu melalui partai buruh akan mengatur apa dan berapa jumlah produksi. Dalam masyarakat impian Marx tersebut, "tiap orang harus bekerja menurut kemampuannya, dan tiap orang memperoleh menurut kemampuannya" (*from each according to his ability, to each according to his needs*).

b. Upah Sebagai Imbalan

Teori Neo Klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marjinal dari faktor produksi tersebut. Ini berarti bahwa pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marjinal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut.

$$W = VMPP_L = MPP_L \times P$$

Keterangan :

W = Tingkat upah (*labour cost*)

P = Harga jual barang (hasil produksi) dalam rupiah per unit barang

MPP_L = *Marginal physical product of labor* atau pertambahan hasil marjinal pekerja, diukur dalam unit barang per unit waktu

VMPP_L = *Value of marginal physical product of labor* atau nilai pertambahan hasil marjinal pekerja atau karyawan

Nilai pertambahan hasil marjinal VMPP_L, merupakan nilai jasa yang diberikan oleh karyawan kepada pengusaha. Sebaliknya upah (W) dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan sebagai imbalan terhadap jasa karyawan yang diberikan kepada pengusaha.

2.4.3 Pengertian Upah Minimum Provinsi

Upah minimum diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum dalam bab 1, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah minimum ditetapkan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Penetapan upah minimum menggunakan formula perhitungan upah minimum yaitu upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto berjalan.

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t)\}$$

Keterangan :

UM_n = Upah minimum yang akan ditetapkan

UM_t = Upah minimum tahun berjalan

π_{t-1} = Inflasi yang dihitung dari periode september tahun yang lalu sampai dengan periode september tahun berjalan

ΔP_{t-1} = Pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan

2.5 Hubungan Variabel-Variabel Penelitian

2.5.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Inflasi adalah suatu keadaan yang terus terjadi di mana harga-harga umum terus naik secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Jika harga barang dan jasa naik secara signifikan dari tahun ke tahun dan hal lain diasumsikan konstan (*ceteris paribus*) maka hal itu akan mendorong meningkatnya jumlah penduduk miskin. Terjadinya inflasi secara terus-menerus dan upah minimum yang tetap sehingga dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mengakibatkan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah terus naik setiap tahunnya dan begitu juga sebaliknya.

Menurut Sugiartiningsih dan Shaleh (2017:522) bahwa :

Hubungan antara inflasi dengan kemiskinan suatu negara adalah searah. Kenaikan inflasi akan tercermin dari kenaikan harga barang dan jasa yang tersedia dan dibutuhkan masyarakat sehingga berefek menurunkan daya beli. Secara global kejadian ini akan menurunkan kesejahteraan secara riil atau dapat pula dikatakan menaikkan kemiskinan. Potret lain dari kenaikan inflasi akan tampak dari peningkatan jumlah uang beredar baik kartal maupun giral melebihi volume barang dan jasa yang dihasilkan. Ketimpangan ini akan menyulut kenaikan harga komoditas yang merambah pada seluruh barang dan jasa sehingga menurunkan kemakmuran masyarakat yang berarti peningkatan kemiskinan.

2.5.2 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Masalah pengangguran adalah masalah yang terus terjadi dalam ketenagakerjaan di setiap wilayah. Tingkat pengangguran yang terus tinggi disuatu wilayah maka akan meningkatkan angka penduduk miskin. Penyebab tingkat pengangguran yang tinggi terjadi dikarenakan tenaga kerja yang terus bertambah banyak setiap tahunnya tetapi tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia dan hal itu membuat jumlah penduduk miskin semakin tinggi setiap tahun di suatu wilayah.

Tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan yang erat dengan jumlah penduduk miskin. Apabila seseorang tidak memiliki pekerjaan atau disebut pengangguran berarti seseorang tersebut tidak memiliki pendapatan/penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan tidak ada kesejahteraan bagi dirinya sendiri atau bagi keluarganya maka hal tersebut akan mempengaruhi bertambahnya jumlah penduduk miskin disuatu wilayah dan begitu juga sebaliknya. "Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Dengan rendahnya pendapatan akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut" (Sundari, 2019:60).

2.5.3 Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Upah minimum provinsi merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara merata dengan menetapkan upah minimum di setiap wilayah Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak bahwa penetapan upah minimum oleh gubernur dilakukan setiap tahun berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam satu bulan. Terdapat tujuh komponen kebutuhan hidup layak yaitu makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi serta rekreasi dan tabungan.

Apabila upah minimum provinsi meningkat berarti masyarakat memiliki pendapatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari meski sekalipun terjadi inflasi pada waktu tertentu sehingga hal tersebut akan menciptakan kesejahteraan dan akan mengurangi jumlah penduduk miskin di suatu wilayah dan begitu juga sebaliknya. Menurut Kaufman sebagaimana dikutip Islami dan Anis (2019:941) bahwa “upaya yang dilakukan untuk mengangkat derajat penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena pendapatan yang rendah yaitu dengan menggunakan kebijakan upah minimum”.

2.6 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Yudha (2013:67-70) dengan judul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011". Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : "Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia".
2. Penelitian Ningrum (2017:189-190) dengan judul "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2015". Penelitian ini menggunakan metode OLS data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : "TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2015".

3. Penelitian Gulo (2020:1) dengan judul "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2000-2018". Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : "Secara parsial pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Pengangguran memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap jumlah penduduk. Upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2018".

2.7 Kerangka Pemikiran

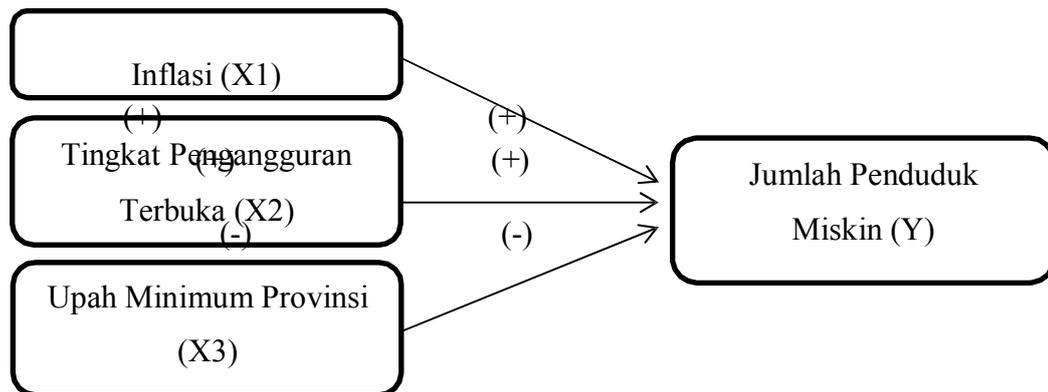
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis maka dimunculkanlah kerangka pemikiran. Kerangka dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas yaitu Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum Provinsi. Dan terdapat satu variabel terikat yaitu Jumlah Penduduk Miskin.

Inflasi adalah suatu persoalan yang selalu dirasakan oleh masyarakat yaitu kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi memiliki hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin, sebab jika harga barang dan jasa mengalami kenaikan terus menerus maka daya beli masyarakat akan berkurang dan akan menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Tingkat pengangguran terbuka adalah suatu persoalan yang terjadi di setiap wilayah yang dapat menimbulkan masalah sosial lainnya seperti meningkatnya jumlah penduduk miskin karena tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin.

Upah minimum provinsi adalah pendapatan yang diterima oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan utama penetapan upah minimum untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga upah minimum provinsi memiliki hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

Ketiga variabel bebas dan satu variabel terikat akan diregresikan untuk mengetahui tanda koefisien regresi dan tingkat signifikan dan diharapkan memberikan jawaban atas hipotesis penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat digambarkan kerangka pemikiran mengenai pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum Provinsi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada di mana kebenarannya masih perlu dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul. Pada dasarnya hipotesis merupakan suatu pernyataan tentang hakikat dan hubungan antara variabel-variabel yang dapat diuji secara empiris.

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang sudah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019
3. Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menganalisis pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum Provinsi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dalam bentuk *time series* yaitu data yang dihimpun secara tidak langsung dalam runtun waktu tertentu. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang teliti meliputi yaitu inflasi, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum provinsi dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2005-2019.

3.3 Model Analisis

3.3.1 Model Kuantitatif

Model yang digunakan untuk menganalisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2019 adalah model analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah teknik analisis yang menjelaskan hubungan variabel-variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan model regresi linear berganda.

3.3.2 PENDUGAAN MODEL EKONOMETRIK

Model analisis yang digunakan untuk hipotesis adalah analisis statistik berupa regresi linear berganda. Model persamaannya regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{i1} + \hat{\beta}_2 X_{i2} + \hat{\beta}_3 X_{i3} + \epsilon_i; i= 1,2,3,\dots,n$$

Di mana :

Y = Jumlah penduduk miskin (jiwa)

$\hat{\beta}_0$ = Intersep

$\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3$ = Koefisien regresi (statistik)

X_{i1} = Inflasi (persen)

X_{i2} = Tingkat pengangguran terbuka (persen)

X_{i3} = Upah minimum provinsi (Rupiah)

ϵ_i = Galat (*Error Term*)

3.4 Pengujian Hipotesis

3.4.1 Uji Secara Individu (Uji-t)

Untuk mengetahui variabel-variabel bebas (inflasi, tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum provinsi) secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (jumlah penduduk miskin), maka dilakukan pengujian dengan uji-t dengan taraf nyata $\alpha = 5\%$.

a. Inflasi (H_0)

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019.

$\beta_1 : \beta_1 > 0$, artinya inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\hat{\sigma}(\beta_1)}$$

Keterangan :

$\hat{\beta}_1$: Koefisien regresi

β_1 : Parameter

$\hat{\sigma}(\beta_1)$: Simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (β_2)

$\beta_0 : \beta_2 = 0$, artinya tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019.

$\beta_1 : \beta_2 > 0$, artinya tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{\sqrt{\hat{\sigma}_2^2}}$$

Keterangan :

$\hat{\beta}_2$: Koefisien regresi

β_2 : Parameter

$\hat{\sigma}_2^2$: Simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya tingkat pengangguran terbuka secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya tingkat pengangguran terbuka secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

c. Upah Minimum Provinsi (β_3)

$\beta_0 : \beta_3 = 0$, artinya upah minimum provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019.

$\beta_1 : \beta_3 < 0$, artinya upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_3 - \beta_3}{\sqrt{\hat{\sigma}_3^2}}$$

Keterangan :

$\hat{\beta}_3$: Koefisien regresi

β_3 : Parameter

$\sigma(\hat{\beta}_3)$: Simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya upah minimum provinsi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya upah minimum provinsi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

Koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *probability* dengan taraf signifikansinya. Apabila nilai probabilitas $< \alpha$ maka koefisien variabel tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat dan begitu sebaliknya. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$ dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jika nilai probabilitas t-statistik $< 0,05$ maka H_0 ditolak H_1 diterima.
- 2) Jika nilai probabilitas t-statistik $> 0,05$ maka H_0 diterima H_1 ditolak.

3.4.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan mengetahui proporsi variabel terikat yang dijelaskan variabel bebas secara serempak. Tujuan uji F statistik adalah untuk menguji secara hubungan variabel-variabel bebas yang diambil mempengaruhi variabel terikat

bersama-sama atau tidak.

Adapun langkah-langkah pengujian uji F sebagai berikut :

- a. Membuat hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) sebagai berikut:

H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, $i = 1, 2, 3$, berarti variabel bebas secara serempak/bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

H_1 : β_i tidak semua nol, $i = 1, 2, 3$ berarti variabel bebas secara serempak/bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

- b. Mencari nilai F_{hitung} dan nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan k dan df untuk numerator ($k-1$) dan df untuk denominator ($n-k$).

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah :

$$F_{hitung} = \frac{JKR (k-1)}{JKG (n-k)}$$

Keterangan :

JKR = Jumlah Kuadrat Regresi

JKG = Jumlah Kuadrat Galat

k = Banyaknya koefisien regresi

n = Banyaknya sampel

Uji F (uji simultan) digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel bebas secara serentak atau simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji F disebut juga uji kelayakan model yang digunakan untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak disini berarti bahwa model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan

pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5%. Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika probabilitas (signifikan) $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_1 diterima.
- 2) Jika probabilitas (signifikan) $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima H_1 ditolak.

3.4.3 Uji Keباikan Suai (R^2)

Uji kebaikan suai bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linear berganda yang digunakan sudah sesuai menganalisis hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan suai model yang digunakan koefisien determinasi R^2 untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh keragaman variabel-variabel bebas. Menurut Widayono (2013:126) bahwa nilai koefisien determinasi R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$; $R^2 \rightarrow 1$ artinya semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya. Jika semakin mendekati angka nol maka kita mempunyai garis regresi yang kurang baik". Rumus untuk mencari uji kebaikan suai (R^2) sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{JKR}{JKT}$$

Keterangan :

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKT : Jumlah Kuadrat Total

3.5 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

3.5.1 Multikolinieritas

Menurut Widarjono (2013:104) bahwa "multikolinieritas adalah hubungan linear antara variabel independen di dalam regresi". Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat (korelasi yang kuat) di antara variabel bebas. Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran :

- a. Nilai-nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar.
- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t.
- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran.
- d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinieritas adalah dengan melihat VIF (*variance inflation factor*), apabila nilai $VIF \leq 10$ dan $Tol \geq 0,1$ maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinieritas namun apabila $VIF \geq 10$ dan $Tol \leq 0,1$ maka dianggap ada pelanggaran multikolinieritas. Untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa parah kolinearitas (korelasi) antar sesama

variabel bebas maka dapat dilihat dari matriks korelasi. Apabila nilai matriks > 0,95 maka kolinearitasnya serius tidak dapat ditolerir. Namun apabila sebaliknya nilai matriks < 0,95 maka kolinearitas dari sesama variabel bebas masih dapat ditolerir.

3.5.2 Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara galat (kesalahan pengganggu, *disturbance error*) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi yaitu sebagai berikut :

a. Uji Durbin Watson (Uji D-W)

Menurut Ghozali sebagaimana dikutip Buulolo (2020:41) bahwa "uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intersep (kostanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen." Uji Durbin Watson dilakukan dengan membandingkan DW_{hitung} dengan DW_{tabel} . Jika terdapat autokorelasi maka galat tidak lagi minim sehingga penduga parameter tidak lagi efisien. Rumus uji Durbin Watson sebagai berikut :

$$dW = \frac{\sum_{i=2}^n (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^n e_i^2}$$

Keterangan :

e_i = residual metode kuadrat terkecil

Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dalam nilai kritis d_L dan d_U dalam tabel distribusi Durbin Watson untuk berbagai nilai α . Secara umum bisa diambil patokan :

1. $0 < d < d_L$: Menolak hipotesis 0 (Ada Autokorelasi Positif)
2. $d_L \leq d \leq d_U$: Daerah Keragu-raguan (Tidak ada Keputusan)
3. $d_U < d < 4 - d_U$: Gagal Menolak Hipotesis 0 (Tidak Ada Autokorelasi Positif / Negatif)
4. $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$: Daerah Keragu-raguan (Tidak ada Keputusan)
5. $4 - d_L < d < 4$: Menolak Hipotesis 0 (Ada Autokorelasi Negatif)

b. Uji Run

Uji mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi dalam model yang digunakan dapat juga digunakan uji Run. Uji Run merupakan bagian dari statistika nonparametik dapat digunakan untuk menguji apakah antar galat terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar galat (residu atau kesalahan pengganggu) tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa galat adalah acak atau random. Menurut Ghozali sebagaimana dikutip Gulo (2020:38) bahwa "Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis)". Cara yang digunakan dalam uji Run adalah sebagai berikut :

◆₀ : Galat (res₁) random (acak)

◆₁ : Galat (res₁) tidak random

3.5.3 Normalitas

Sesuai teorema Gauss Markov :

$$\hat{\beta}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \hat{\epsilon}_{1i} + \hat{\beta}_2 \hat{\epsilon}_{2i} + \dots + \hat{\beta}_k; i = 1, 2, 3, \dots, n$$

- a. $\epsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$: Apakah galat (*distribusi error*) menyebar normal atau tidak
- b. ϵ_i : Tidak terjadi autokorelasi

Asumsi klasik yang lain dalam pendugaan dengan menggunakan penduga OLS adalah kenormalan. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel galat atau residu memiliki sebaran normal. Penggunaan uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai galat menyebar normal. Menurut Ghozali sebagaimana dikutip Manik (2020:29) bahwa "kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil." Untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak digunakan analisis grafik dan uji statistik.

1) Analisis Grafik

Untuk menguji normalitas galat dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antar data pengamatan dengan sebaran yang mendekati sebaran normal. Caranya adalah dengan melihat sebaran peluang normal yang membandingkan dengan kumulatif dari sebaran normal. Sebaran normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan diagram data galat akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika sebaran data galat atau residu normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

2) Analisis Statistik

Untuk menguji apakah galat atau residu menyebar normal dengan menggunakan grafik dapat memberikan kesimpulan yang tidak tepat kalau

tidak hati-hati secara visual. Oleh sebab itu dilengkapi dengan uji statistik yaitu dengan melihat nilai kemencengan atau penjuluran (*skewness*) dan keruncingan (*kurtosis*) dari sebaran galat.

Menurut Ghozali sebagaimana dikutip Manik (2020:29-30) bahwa :

Nilai z statistik untuk kemencengan dan nilai z keruncingan dapat dihitung dengan rumus berikut ini :

$$Z_{\text{kemencengan}} = \frac{\text{Skewness}}{\frac{\sqrt{6}}{n}} \quad \text{dan} \quad Z_{\text{keruncingan}} = \frac{\text{Kurtosis}}{\frac{\sqrt{24}}{n}}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

Untuk menguji apakah sebaran galat pendugaan regresi menyebar normal atau tidak, dapat digunakan uji statistik lain yaitu uji statistik nonparametik Kolmogrof-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Data galat (residu) menyebar normal

H_1 : Data galat tidak menyebar normal

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Jumlah Penduduk Miskin (Y)

Jumlah penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan satuan dalam jiwa per tahun.

b. Inflasi (X1)

Inflasi adalah suatu keadaan kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus yang diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah inflasi kumulatif tahunan di

provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan satuan persen per tahun.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (X2)

Pengangguran yaitu seorang yang sudah termasuk dalam golongan angkatan kerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari kerja. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka di provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019. Sumber data diperoleh dari BPS dengan satuan persen per tahun.

d. Upah Minimum Provinsi (X3)

Upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah upah minimum provinsi di Sumatera Utara tahun 2005-2019. Sumber data diperoleh dari BPS dengan satuan rupiah per tahun.